

RESPON PEMERINTAH CHAD TERHADAP ARUS PENGUNGSI SUDAN TAHUN 2023

Muh. Rizaldi Nur Ratullah¹, Sonny Sudiar²

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Mulawarman

Abstrak

Perang saudara di Sudan antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) telah menyebabkan berbagai masalah di Sudan, sehingga banyak warga Sudan harus mengungsi ke dalam negeri atau ke negara tetangga, salah satunya adalah Chad. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons pemerintah Chad terhadap arus pengungsi Sudan pada tahun 2023. Pemerintah Chad menanggapi pengungsi Sudan dengan mengeluarkan Keputusan No.0648/PT/PM/MATDBG/2023, yang bertujuan untuk menetapkan langkah-langkah pelaksanaan Undang-Undang No. 027/PR/2020 tentang Suaka di Chad. Keputusan ini memberikan peluang penting bagi pengungsi, seperti: akses ke tanah dan kepemilikan yang aman, kebebasan bergerak dan hak untuk menetap, serta akses ke kartu identitas, yang berfungsi sebagai izin tinggal dan memungkinkan pengungsi mengakses layanan publik. Selain itu, dekrit ini juga mengatur tiga prinsip perlindungan pengungsi yang tercantum dalam Konvensi 1951, yaitu Non-Refoulement, Non-Penalization, dan Non Discrimination. Pemerintah Chad juga menerapkan prosedur penerimaan pengungsi berdasarkan dua peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 027/PR/2020 dan Dekret No.0648/PT/PM/MATDBG/2023, yang sejalan dengan konvensi Jenewa 1951.

Kata Kunci: Perang Saudara Sudan, RSF, SAF, Pengungsi Sudan, Respons Chad

Abstract

The civil war in Sudan between the Sudan Armed Forces (SAF) and the Rapid Support Forces (RSF) has caused various problems in Sudan, leading many Sudanese citizens to seek refuge within the country or in neighboring countries, one of which is Chad. This study aims to analyze the response of the Chadian government to the influx of Sudanese refugees in 2023. The Chadian government responded to the Sudanese refugees by issuing Decree No.0648/PT/PM/MATDBG/2023, which aims to establish the implementation measures of Law No. 027/PR/2020 on Asylum in Chad. This decree provides important opportunities for refugees, such as: access to land and secure ownership, freedom of movement and the right to settle, as well as access to identification cards, which serve as residence permits and enable refugees to access public services. In addition, this decree also regulates the three principles of refugee protection set out in the 1951 Convention, namely Non-Refoulement, Non-Penalization, and Non Discrimination. The Chadian government also implements refugee reception procedures based on two applicable regulations, namely, Law No. 027/PR/2020 and Decree No.0648/PT/PM/MATDBG/2023, which is in line with the 1951 Geneva convention.

Keywords: Sudan Civil War, RSF, SAF, Sudan Refugees, Chad Response

1. PENDAHULUAN

Pada 15 April 2023 terjadi perang saudara antara Sudanese Armed Forces atau SAF di bawah pimpinan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dengan Rapid Support Force atau RSF di bawah pimpinan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo atau yang dikenal sebagai Hemedti (Al Jazeera, 2023).

Persetujuan ini bermula dari perbedaan pendapat antara RSF dan SAF terkait rencana integrasi RSF ke dalam militer yang merupakan bagian dari kesepakatan transisi demokrasi setelah kudeta militer tahun 2021, RSF ingin integrasinya ke dalam militer terjadi dalam 10 tahun, sementara SAF menuntut integrasi dalam waktu dua tahun karena SAF tidak mau memberi RSF waktu untuk terus memperluas pengaruhnya dan memperkuat otonominya di luar pengawasan militer (BBC, 2023).

Pertempuran ini pertama kali terjadi di ibu kota Khartoum dimana RSF menyerang pangkalan SAF kota Khartoum. Terjadi juga bentrokan di markas besar penyiar negara, Sudan TV. Keesokan harinya terjadi serangan balasan SAF, pasukan SAF Berhasil merebut kembali bandara Merowe beserta markas besar Sudan TV dan radio pemerintah (BBC, 2023).

Pada April 2023, PBB melaporkan bahwa Sudan kekurangan barang-barang pokok, seperti makanan, air, obat-obatan, dan bahan bakar telah menjadi "sangat akut" (Al Jazeera, 2023). Program Pangan Dunia atau WFP mengatakan bahwa bantuan pangan senilai lebih dari \$13 juta yang ditujukan ke Sudan telah dijarah dalam dua puluh hari sejak pertempuran pecah. Penjarahan gudang WFP di El-Obeid pada 1 Juni 2023 menyebabkan hilangnya bantuan makanan yang bertujuan untuk memberi makan 4,4 juta orang (Al Jazeera, 2023). Pada 25 Juli 2023, Koordinator Kemanusiaan Clementine Nkweta-Salami mengatakan bahwa serangan terhadap fasilitas kemanusiaan telah menyebabkan lebih dari 50 gudang dijarah, 82 kantor digeledah, dan lebih dari 200 kendaraan dicuri (Radio Dabaga, 2023).

Masalah-masalah yang terjadi di atas menjadi alasan masyarakat Sudan memilih untuk mengungsi. Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), lebih dari 5,4 juta orang telah menjadi pengungsi internal (IDPs), pengungsi internal ini mencari perlindungan di beberapa negara bagian Sudan yang masih relatif aman seperti di Darfur Selatan, Darfur Utara, Darfur Tengah, Darfur Timur, Aj Jazirah, Nil Putih, dan Sennar. Selain itu, menurut UNHCR hingga 11 Desember Sekitar 1,4 juta masyarakat Sudan mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Republik Afrika Tengah, Chad, Mesir, Ethiopia, dan Sudan Selatan (OCHA, 2023).

Negara Chad merupakan salah satu negara tujuan para pengungsi Sudan dikarenakan berdasarkan letak geografis kedua negara tersebut merupakan negara

tetangga, negara Chad berbatasan langsung dengan Sudan di sebelah timur. Pada tanggal 15 April 2023, Chad melaporkan ribuan pengungsi datang melewati perbatasan. Pada tanggal 19 April 2023 UNHCR melaporkan gelombang besar pengungsi yang menyeberang terutama dari Darfur yang berjumlah 20.000 orang, pada akhir Mei pengungsi yang masuk berjumlah lebih dari 90.000, pada bulan Juni pengungsi yang masuk berjumlah lebih dari 115.000, dan pada bulan Juli pengungsi yang masuk berjumlah lebih dari 239.000. UNHCR kemudian melaporkan bahwa para pengungsi tersebut tidak memiliki kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal. UNHCR juga melaporkan bahwa mayoritas dari pengungsi yang datang adalah perempuan dan anak-anak. Lalu pada bulan Desember 2023 jumlah pengungsi telah mencapai lebih dari 484.600 menjadikan Chad sebagai negara penerima pengungsi terbanyak (UNHCR, 2023).

Krisis pengungsi ini menempatkan Chad dalam posisi yang sangat rentan. Negara ini sebelumnya telah menampung lebih dari 580.000 pengungsi dan pengungsi internal akibat konflik di Sudan, Republik Afrika Tengah, dan Nigeria. Dengan masuknya ratusan ribu pengungsi baru sepanjang tahun 2023, jumlah total pengungsi di Chad telah mencapai 1 juta jiwa. Beban ini diperparah oleh kondisi internal Chad yang sudah menghadapi tantangan ekonomi berat, seperti ketergantungan pada sektor minyak, tingginya angka kemiskinan, serta ketidakstabilan politik pasca wafatnya Presiden Idriss Déby pada 2021.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan sumber data yang berasal dari data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah *library research* dan teknik analisis data kualitatif, dan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis respon pemerintah Chad terhadap arus pengungsi Sudan tahun 2023 adalah konsep pengungsi.

KERANGKA KONSEPTUAL

Konsep Pengungsi

Pietro Verri memberikan definisi tentang pengungsi dengan mengutip bunyi Pasal 1 Konvensi 1951, ia memberikan definisi “applies to many person who has fled the country of his nationality to avoid persecution or the threat of

persecution”(Romsan, 2003). Jadi menurut Pietro Verri pengungsi adalah orang-orang yang meninggalkan negaranya karena adanya rasa ketakutan akan penyiksaan atau ancaman penyiksaan.

Dalam membahas persoalan pengungsi terdapat dua aturan internasional yang mengatur pengungsi yakni konvensi 1951 dan protokol 1967, keduanya menjadi landasan utama bagi negara-negara dalam menetapkan hak, kewajiban, serta mekanisme dalam memberikan perlindungan terhadap individu yang terpaksa lari dari negara asalnya akibat adanya konflik atau penganiayaan yang terjadi.

Konvensi 1951 memberikan definisi terhadap pengungsi sebagai individu yang memiliki ketakutan terhadap penganiayaan berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keterlibatan dalam kelompok sosial tertentu, atau perbedaan pandangan politik, dan berada diluar negaranya. Konvensi ini mengatur hak-hak penting seperti hak memperoleh perlindungan dari pemulangan paksa (non refoulement), akses terhadap pendidikan, pekerjaan, perumahan, hak atas dokumen perjalanan, dan akses terhadap keadilan. Tetapi konvensi ini hanya berlaku bagi pengungsi sebelum peristiwa 1 Januari 1951, dan hanya mengakui pengungsi dari kawasan Eropa (Hathaway, 2005).

Pada tahun 1960-an, krisis pengungsi muncul di Asia, Afrika, dan Timur Tengah akibat dari perang, konflik regional, dan instabilitas politik, sehingga definisi pengungsi dari konvensi 1951 dianggap tidak relevan lagi (Loescher, 2001). Untuk itu dibentuklah protokol 1967, Protokol ini menghapus seluruh batasan baik secara geografis maupun kejadian di waktu tertentu, sehingga definisi pengungsi berlaku secara universal tanpa mengacu pada peristiwa sebelum 1951. Protokol 1967 ini tidak menciptakan hak atau kewajiban baru, melainkan memastikan bahwa ketentuan dalam konvensi 1951 dapat diterapkan terhadap seluruh situasi pengungsi modern (UN General Assembly, 1967).

Dalam konvensi 1951 terdapat 3 prinsip utama perlindungan pengungsi, yakni:

1. Prinsip Non-Refoulement terdapat pada pasal 33 konvensi 1951 yang menyatakan bahwa “Pengungsi dan pencari suaka tidak boleh dikembalikan secara paksa ke wilayah di mana nyawanya dan/atau kebebasannya akan terancam”.
2. Prinsip Non-Penalization terdapat pada pasal 31 konvensi 1951 yang

menyatakan bahwa “Pengungsi dan pencari suaka tidak boleh dikenai sanksi/hukuman karena memasuki wilayah negara suaka untuk mencari perlindungan tanpa disertai dokumen yang lengkap”.

3. Prinsip Non-Diskrimination terdapa pada pasal 3 konvensi 1951 yang menyatakan bahwa “Perlakuan terhadap pengungsi dan pencari suaka tidak boleh dibeda-bedakan berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik”.

3. PEMBAHASAN

Perang Saudara Sudan 2023

Perseteruan ini bermula dari perbedaan pendapat antara RSF dan SAF terkait rencana integrasi RSF ke dalam militer, RSF ingin integrasinya kedalam militer terjadi dalam 10 tahun, sementara SAF menuntut integrasi dalam waktu dua tahun karena SAF tidak mau memberi RSF waktu untuk terus memperluas pengaruhnya dan memperkuat otonominya di luar pengawasan militer, dan juga perbedaan pendapat tentang status perwira RSF dan apakah pasukan RSF berada di bawah komando panglima angkatan darat atau panglima tertinggi Sudan, yakni Burhan (CNN world, 2023).

Pada 11 April 2023, pasukan RSF melakukan mobilisasi pasukannya di kota Khartoum serta di dekat kota Merowe. Bentrokan pun terjadi setelah pasukan RSF mengambil kendali pangkalan militer Soba di selatan Khartoum. Pada 13 April 2023, RSF kembali melakukan mobilisasi pasukannya, mobilisasi ini memicu kekhawatiran akan pemberontakan terhadap junta militer. Pada 15 April 2023 perang pun terjadi antara pasukan RSF dengan SAF (Aljazeera, 2023). Awalnya pertempuran diperkirakan akan berakhir dalam beberapa hari. Hal ini dikarenakan perbedaan kekuatan yang sangat besar antara SAF dan RSF, SAF memiliki pesawat tempur, tank, dan peralatan militer lainnya, sedangkan unit dasar RSF adalah truk pickup yang dilengkapi dengan senjata api. Namun, pertarungan keduanya masih berlangsung hingga sekarang. Ini dikarenakan RSF melakukan serangan gerilya terhadap pangkalan-pangkalan utama SAF dan rumah-rumah di Khartoum menjadi benteng pertahanan (New York Times, 2023).

Selain pihak RSF dan pihak SAF yang bertempur, banyak juga pihak-pihak

lainnya di Sudan yang terlibat dalam perang ini, seperti Sudan people's liberation movement-north (SPLM-N) yang dipimpin oleh Abdelaziz al-hilu, serta pemberontakan Tamazuj yang bergabung dengan RSF, dan Sudan liberation movement yang dipimpin oleh Mustafa Tambour yang bergabung dengan SAF.

Untuk menghentikan peperangan yang terjadi sudah banyak dilakukan gencatan senjata antara RSF dan SAF, tetapi gencatan senjata tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan kurangnya komitmen dari kedua pihak. Gencatan senjata pertama dilakukan pada 10 hari setelah konflik antara SAF dan RSF pecah, SAF dan RSF sepakat untuk menerapkan gencatan senjata nasional yang dimulai pada tengah malam pada 24 April dan berlangsung selama 72 jam. Hal ini terjadi setelah Sekjen PBB memperingatkan bahwa Sudan berada di “tepi jurang maut” menyusul pertempuran antara dua pihak yang bersaing di ibu kota Khartoum serta di tempat lain di Sudan, namun gencatan senjata tersebut gagal akibat penembakan yang terjadi di kota Khartoum (New Wires, 2023).

Gencatan senjata kedua terjadi pada tanggal 11 Mei 2023 setelah pemerintah Arab Saudi dan Amerika Serikat melakukan mediasi terhadap Pihak RSF dan SAF di Jeddah. Perjanjian ini bernama “Jeddah Declaration of Commitment to Protect the Civilians of Sudan” yang ditandatangani oleh SAF dan RSF. Perjanjian ini ditandatangani dalam rangka deklarasi komitmen mengakui kewajiban kedua belah pihak berdasarkan hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional untuk memfasilitasi aksi kemanusiaan guna memenuhi kebutuhan darurat warga sipil (IGAD Secretariat, 2023). Namun, gencatan senjata yang dilakukan kembali gagal akibat faksi SPLM-N yang dipimpin oleh Abdelaziz al-Hilu melanggar perjanjian gencatan senjata yang berlangsung dengan menyerang unit SAF di Kadugli, Kurmuk, dan al-Dalanj (Alarabiya, 2023). Pemerintah AS dan Arab Saudi kembali melakukan mediasi antara pihak pihak yang bertikai, hasilnya pihak SAF dan RSF sepakat untuk menghentikan pertempuran dan menahan diri dari mencari keuntungan selama gencatan senjata, dan juga akan mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke seluruh negeri. Gencatan senjata tersebut berlaku pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 6 pagi dan akan berlangsung hingga 21 Juni. Namun, gencatan senjata tersebut kembali gagal karena penyerangan pesawat dan drone di kota Khartoum (Al Jazeera, 2023). Perang pun masih berlanjut hingga sekarang, dikarenakan kurangnya komitmen untuk mengakhiri perang dari kedua

pihak.

Perang Saudara antara SAF dan RSF di Sudan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat Sudan. Perang ini telah menelan korban jiwa dan luka yang sangat tinggi. Menurut data WHO per Desember 2023, sedikitnya 12.260 orang dilaporkan tewas dan sekitar 33.000 orang luka-luka akibat pertempuran selama periode April–Desember 2023 (UN Geneva, 2023). Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), lebih dari 5,4 juta orang telah menjadi pengungsi internal (IDPs), pengungsi internal ini mencari perlindungan di beberapa negara bagian Sudan yang masih relative aman seperti di Darfur Selatan, Darfur Utara, Darfur Tengah, Darfur Timur, Aj Jazirah, Nil Putih, dan Sennar. Selain itu, menurut UNHCR Sekitar 1,4 juta masyarakat Sudan mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Republik Afrika Tengah, Chad, Mesir, Ethiopia, dan Sudan Selatan (OCHA, 2023).

Perang Sudan ini tidak hanya memberikan dampak kemanusiaan, tetapi memberikan dampak pada sektor lainnya, seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan pangan. Pada sektor kesehatan, menurut WHO lebih dari 70% rumah sakit 31 tidak beroperasi. Dari 59 rumah sakit yang tidak beroperasi di zona konflik, 17 rusak akibat diserang oleh artileri, 20 dievakuasi, dan 12 diubah menjadi barak oleh RSF. Rumah sakit yang tersisa menanggihkan pelayanan karena pemadaman listrik, kekurangan bahan bakar untuk generator, kurangnya pasokan medis, dan kekurangan tenaga kesehatan. Rumah sakit yang masih beroperasi melaporkan kekurangan tenaga kesehatan dikarenakan para tenaga kesehatan juga mengungsi, sehingga sangat membatasi kapasitas rumah sakit. Tenaga kesehatan yang tersisa tidak dapat mengakses fasilitas kesehatan karena takut akan keselamatan mereka dikarenakan kekerasan terhadap petugas kesehatan meningkat, sejak dimulainya konflik 13 petugas kesehatan tewas, 4 diculik oleh milisi dan 9 dilaporkan hilang (Dafallah, 2023).

Pada sektor pendidikan, menurut laporan Save the Children (SC) dan UNICEF, konflik ini telah menyebabkan sekitar 12 juta anak kehilangan kesempatan bersekolah sejak April 2023, dengan total jumlah anak di Sudan yang 32 tidak bersekolah mencapai 19 juta, Dari total tersebut, 6,5 juta anak telah kehilangan akses ke sekolah karena meningkatnya kekerasan dan ketidakamanan, dengan

setidaknya 10.400 sekolah kini ditutup di daerah yang terkena dampak konflik. Sementara itu, lebih dari 5,5 juta anak yang tinggal di daerah yang kurang terkena dampak perang sedang menunggu otoritas setempat dan hampir 7 juta anak memang tidak bersekolah (OCHA, 2023).

Pada sektor ekonomi, menurut Bank Dunia, perekonomian Sudan diperkirakan akan menyusut sebesar 12 persen pada tahun 2023 karena konflik telah menyebabkan runtuhnya aktivitas ekonomi. Sementara itu, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) riil Sudan akan menurun sebesar 18 persen pada akhir tahun 2023 (OCHA, 2023).

Menteri Keuangan Sudan melaporkan pada November 2023 bahwa perang tersebut telah mengakibatkan kerugian ekonomi melebihi 26 miliar dolar AS atau lebih dari setengah nilai ekonomi negara tersebut setahun sebelumnya. Sektor industri, yang meliputi manufaktur dan pengolahan minyak, telah kehilangan lebih dari 50% nilainya. Lapangan kerja telah berkurang sebanyak 4,6 juta pekerjaan selama konflik. Lebih dari 7 juta orang telah masuk ke dalam kemiskinan (Siddiq, 2025).

Konflik bersenjata memiliki dampak yang parah dan berkepanjangan terhadap sistem pangan, Konflik ini telah membuat sekitar 17,7 juta orang di seluruh Sudan ke tingkat kerawanan pangan akut yang tinggi (IPC fase 3 +), ini termasuk sekitar 4,9 juta orang yang berada di Fase 4 IPC (Darurat) dan hampir 12,8 juta orang berada di Fase 3 IPC (Krisis). Food and Agriculture Organization atau FAO telah memperingatkan tentang krisis ketahanan pangan yang meningkat di Sudan dan mendesak tindakan segera untuk mencegah bencana kemanusiaan yang akan datang (OCHA, 2023).

Masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat Sudan menjadi alasan masyarakat Sudan memilih untuk mengungsi ke negara-negara tetangga seperti : Chad, Republik Afrika Tengah, Mesir, Ethiopia, dan Sudan Selatan.

Masalah pengungsi Sudan di Chad

Negara Chad merupakan salah satu negara yang paling banyak didatangi oleh pengungsi Sudan. Letaknya yang berbatasan langsung dengan zona konflik

menjadikan wilayah timur Chad sebagai jalur masuk utama. Pengungsi Sudan masuk melalui lebih dari 32 titik lintas batas, terutama di provinsi Ouaddaï, Sila, Wadi Fira, dan Ennedi Est, yang kini menampung sebagian besar populasi pengungsi dari Sudan. Hingga Desember 2023, Chad telah menerima lebih dari 484,600 pengungsi baru, dimana mayoritas pengungsi tersebut adalah perempuan dan anak-anak, dan sebagian besar dari mereka tiba dalam kondisi kesehatan yang buruk.

Pengungsi-pengungsi dari Sudan tersebut ditempatkan daerah-daerah yang berdekatan dengan perbatasan, seperti : Abeche, Adre, Am Nabak, Arkoum, Djabal, Farchana, Gaga, Goz Amir, Iridimi, Kounougou, Métché, Mile, Aboutengué, Oure Cassoni, Touloum, Zabout & Tissi (UNHCR, 2023).

Masuknya ratusan ribu jiwa secara mendadak ke wilayah timur Chad telah memicu gangguan ekonomi. Salah satu pemicu utama gangguan tersebut adalah penutupan perbatasan dan terhentinya jalur perdagangan lintas batas utama antara Sudan dan Chad akibat eskalasi militer (UNHCR, 2025). Sebelum konflik, wilayah timur Chad sangat bergantung pada pasokan komoditas bahan pokok dan bahan bakar dari Sudan. Berhentinya arus pasokan ini, ditambah dengan lonjakan permintaan yang tinggi akibat dari banyak pengungsi, memicu inflasi bahan pokok hingga tiga kali lipat. Sebagai contoh, harga satu karung millet di pasar lokal timur Chad melonjak dari setara dengan \$19,50 USD sebelum krisis menjadi \$65 USD (Action Against Hunger, 2023). Bagi masyarakat lokal Chad, inflasi ekstrem ini merupakan pukulan telak mengingat wilayah ini sudah berada di bawah tekanan kemiskinan struktural, di mana lebih dari 42% populasi nasional hidup di bawah garis kemiskinan (Salih Abdo, 2025).

Pada pasar tenaga kerja lokal, kehadiran pengungsi Sudan memberi tekanan terhadap pendapatan masyarakat lokal akibat melimpahnya pasokan tenaga kerja tidak terampil dari kalangan pengungsi. Sebagian besar pengungsi Sudan yang tiba di Chad memiliki tingkat pendidikan formal yang sangat rendah; data registrasi menunjukkan proporsi pengungsi tanpa pendidikan formal meningkat dari 43% sebelum krisis menjadi 63%. Hal ini menciptakan persaingan yang sangat ketat di sektor pekerjaan informal, seperti buruh tani musiman, pengumpulan kayu bakar, dan konstruksi kasar (UNHCR, 2025).

Di sektor kesehatan, krisis ini memberikan tekanan yang luar biasa pada sistem yang sudah rapuh. Berdasarkan laporan *Health Resources and Services Availability Monitoring System (HeRAMS)* Desember 2024, sekitar 38% fasilitas kesehatan di tujuh provinsi perbatasan Chad berada dalam kondisi tidak berfungsi akibat ketiadaan obat-obatan, peralatan medis, dan tenaga kesehatan (WHO, 2025). Kondisi ini diperparah oleh penyebaran penyakit menular lintas batas dari Sudan, termasuk epidemi kolera, campak, malaria, hepatitis E, rubella, demam berdarah (dengue), konjungtivitis, dan difteri (WHO, 2025). Di Provinsi Ouaddai, wabah kolera yang merebak cepat pada Agustus 2025 menginfeksi 288 orang dan merenggut 16 nyawa hanya dalam waktu satu minggu di kamp-kamp pengungsi yang padat (IRC, 2025).

Di sektor pendidikan, Chad menghadapi darurat kemanusiaan jangka panjang dengan lebih dari 250.000 anak pengungsi usia sekolah yang saat ini tidak mendapatkan akses pendidikan formal (Salih Abdo, 2025). Di sekolah-sekolah darurat yang beroperasi di sekitar lokasi pengungsian, rasio kepadatan kelas melonjak ekstrem hingga melebihi 100 siswa per satu guru (UNHCR, 2026). Upaya pengintegrasian pengungsi ke dalam kurikulum nasional Chad, sebagaimana diamanatkan dalam Strategi Pendidikan Pengungsi Nasional 2030, terhambat akibat dari ketiadaan ruang kelas dan minimnya pendanaan untuk melatih guru-guru baru. Kurangnya fasilitas pendidikan yang berkepanjangan ini meningkatkan risiko eksploitasi anak, pernikahan dini di kalangan anak pengungsi perempuan, dan rekrutmen paksa oleh kelompok bersenjata yang aktif di perbatasan utara dan barat Chad (War Child UK, 2026).

Kehadiran pengungsi Sudan di Chad menimbulkan berbagai problematika, antara lain: beban pada sumber daya lokal. Pengungsi dan masyarakat lokal seringkali bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, seperti air dan lahan pertanian, sehingga meningkatkan ketegangan sosial. Akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan bagi pengungsi seringkali tidak memadai, dengan banyak anak tidak dapat bersekolah. Dalam beberapa kasus, ketegangan antara pengungsi dan penduduk lokal dapat menyebabkan konflik, yang diperburuk oleh kondisi keamanan yang rapuh di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, situasi pengungsi Sudan di Chad menunjukkan tantangan besar baik bagi pengungsi itu sendiri

maupun bagi negara tuan rumah, menuntut perhatian dan upaya kolaboratif dari komunitas internasional untuk menemukan solusi yang berkelanjutan.

Respon Pemerintah Chad Terhadap Arus Pengungsi Sudan

Sebagai salah satu negara yang meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, Chad pada tahun 2020, membuat Undang-Undang Suaka yang tertuang dalam Undang-Undang No. 027/PR/2020 tentang Suaka di Republik Chad (Jumah, 2023). Undang-Undang Suaka 2020 ini diawasi oleh lembaga nasional untuk perlindungan pengungsi dan pencari suaka di Chad, yaitu *COMMISSION NATIONALE D'ACCUEIL, DE REINSERTION DES REFUGIES ET DES RAPATRIES* atau *CNARR*.

Pada tahun 2023, dalam merespon arus pengungsi dari Sudan akibat perang yang terjadi, pemerintah Chad meresponnya dengan cepat. Hanya dalam sepuluh hari setelah konflik di Sudan terjadi tepatnya pada tanggal 25 April 2023 Presiden Transisi Chad yakni Mahamat Idriss Deby Itno mengeluarkan Dekrit No.0648/PT/PM/MATDBG/2023. Dekrit ini bertujuan untuk menetapkan langkah langka dalam menerapkan Undang-Undang No. 027/PR/2020 tentang Suaka di Republik Chad (Jumah, 2023).

Dalam menerima masyarakat Sudan yang datang akibat dari perang yang terjadi, Chad menerapkan prosedur penerimaan pengungsi yang berdasarkan dua peraturan yang berlaku yakni, Undang-Undang No. 027/PR/2020 dan Dekrit No.0648/PT/PM/MATDBG/2023. Adapun tahapan prosedur dalam penerimaan pengungsi Sudan di Chad adalah sebagai berikut:

1. Ketika masyarakat Sudan tiba di daerah perbatasan Chad, otoritas keamanan Chad dan aparat lokal mengamankan area sementara, kemudian mengevakuasi masyarakat Sudan ke lokasi tertutup (minimal 50 km dari perbatasan) demi keamanan (Pasal 10 dekrit). Lalu *CNARR* bersama *UNHCR* melakukan pre registration segera (Pasal 11 dekrit). Di sini, petugas membentuk daftar kedatangan (pencatatan keluarga) dan memeriksa dokumen awal. *CNARR* dan *UNHCR* memberikan penjelasan hak dasar & prosedur, serta mengidentifikasi kelompok rentan (ibu hamil, orang sakit, lansia).
2. Pencari Suaka Sudan tersebut kemudian dibawa ke lokasi transit atau

penampungan sementara. Di sini, petugas *CNARR* dan *UNHCR* meregistrasi secara biometrik (sidik jari, foto) setiap individu. Masing-masing pencari suaka diwawancarai ringkas untuk alasan kedatangan. Berdasarkan Pasal 14 UU, *CNARR* lalu menerbitkan surat keterangan pencari suaka atau provisional residence permit dengan masa berlaku 6 bulan. Surat ini adalah bukti status sementara dan izin tinggal sah selama proses *refugee status determination (RSD)* atau penentuan status pengungsi berjalan. Hasil wawancara awal dan dokumen kemudian diserahkan ke Sekretariat *CNARR*. Pada tahap ini, para pencari suaka akan mendapat bantuan dasar seperti medis, makanan, pakaian, dll.

3. Setiap pencari suaka secara formal akan mengajukan permohonan status pengungsi ke *CNARR* (Pasal 14 UU). Mereka diwawancara lebih mendalam oleh *Eligibility Commission CNARR* yang melibatkan *UNHCR* sebagai pengamat (Pasal 15 UU). Dalam praktik krisis besar, *CNARR* cenderung menerapkan pengakuan *prima facie* (massal) untuk kebanyakan pendatang. Bagi pencari suaka yang permohonannya disetujui, Menteri Dalam Negeri Chad akan mengeluarkan kartu identitas pengungsi yang berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Kartu ini sekaligus menjadi izin tinggal resmi (Pasal 73 dekrit). Jika permohonan ditolak, pemohon dapat melakukan banding ke *Sous-commission de Recours* dalam 30 hari (Pasal 16 UU), dengan sidang pengadilan administrasi sebagai upaya terakhir.
4. Pengungsi Sudan tersebut kemudian dipindahkan ke pemukiman terintegrasi yang telah disiapkan pemerintah Chad. Pemerintah Chad mengimplementasikan konsep *villagisation*: mengganti kamp tertutup dengan “kamp terintegrasi” di dalam permukiman, dengan petakan rumah dan lahan pertanian.

Selain mengatur tentang prosedur kedatangan pengungsi, Dekrit 2023 ini juga mengatur tentang 3 prinsip perlindungan pengungsi yang diatur dalam Konvensi 1951, yakni: 1. *Non-Refoulement*, diatur dalam pasal 51, 52, 53, dan 79 Dekrit tahun 2023, 2. *Non-Penalization*, diatur pada pasal 64 Dekrit tahun 2023, dan 3. *Non-Diskrimination*, diatur dalam pasal 2 Dekrit tahun 2023.

Sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi Jenewa 1951, maka berdasarkan penjelasan di atas, dapat disebutkan bahwa respon pemerintah Chad

terhadap arus pengungsi Sudan merupakan tindakan kepatuhan terhadap konvensi 1951. Tindakan kepatuhan ini dapat dilihat dari prosedur penerimaan pengungsi yang dilakukan oleh Chad terhadap pengungsi Sudan dan keluarnya Dekrit No.0648/PT/PM/MATDBG/2023 sebagai respon dari arus pengungsi Sudan, dimana isi Dekrit ini juga sejalan dengan isi dari konvensi Jenewa 1951.

Walaupun demikian, dalam menerima pengungsi Sudan, Chad menghadapi tantangan besar, yakni kurangnya kapasitas negara dalam mengelola krisis yang besar dan kompleks. Lembaga utama Chad yang menangani isu pengungsi, yaitu *Commission Nationale d'Accueil, de Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés* atau CNARR, masih sangat bergantung pada dukungan teknis dan logistik dari UNHCR dan lembaga internasional lainnya. Berbagai program integrasi seperti villagization yang bertujuan mengubah kamp pengungsi menjadi desa permanen dengan fasilitas dasar, masih terhambat akibat kurangnya pendanaan dan kapasitas negara dalam melaksanakannya, serta belum meratanya koordinasi antara otoritas pusat, pemerintah lokal, dan organisasi non-pemerintah (UNHCR, 2024, pp. 3-4). Dalam situasi ini, implementasi yang dijanjikan oleh kebijakan nasional menjadi sulit diwujudkan, terutama ketika pemerintah harus mengalokasikan sumber daya terbatasnya untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang terus membesar.

4. KESIMPULAN

Respon Chad terhadap arus pengungsi Sudan adalah dengan mengeluarkan Dekrit No.0648/PT/PM/MATDBG/2023 yang bertujuan untuk menetapkan langkah langka dalam menerapkan Undang-Undang No. 027/PR/2020 tentang Suaka di Republik Chad.

Dekrit ini mengatur tentang 3 prinsip perlindungan pengungsi yang diatur dalam Konvesi 1951, yakni : Prinsip Non-Refoulement diatur dalam pasal 51,52,53, dan 79, Prinsip Non-Penalization diatur pada pasal 64, dan Prinsip Non Diskrimination diatur dalam pasal 2 Dekrit.

Chad juga menerapkan prosedur penerimana pengungsi Sudan yang datang yang berdasarkan dua peraturan yang berlaku yakni, Undang-Undang No. 027/PR/2020 dan Dekrit No.0648/PT/PM/MATDBG/2023.

Berdasarkan Dekrit No.0648/PT/PM/MATDBG/2023 yang dikeluarkan

pemerintah Chad sebagai respon terhadap arus pengungsi Sudan tahun 2023 dan prosedur yang diterapkan dalam menerima pengungsi Sudan, maka dapat disebutkan bahwa respon pemerintah Chad tersebut merupakan suatu tindakan kepatuhan terhadap konvensi Jenewa 1951.

REFERENSI

- Al Arabiya. 2023. Sudan army ruler says talks over civil rule suspended for 72 hours. Diambil dari: <https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2019/05/16/Sudan-army-ruler-says-talks-over-civil-rule-suspended-for-72-hours>
- Abdo. S. 2025. Chad"s Response to the Sudan Crisis. Diambil dari : <https://developmentactionrefugees.org/country-responses/chad>
- Acion Against Hunger. 2023. Crisis In Chad Grows for Sudanese Refugees and Host Communities. Diambil dari : <https://www.actionagainsthunger.org/story/growing-crisis-in-chad-sudan-refugees-host-communities/>
- Aljazeera. 2023. 100 days of conflict in Sudan : A timeline. Diambil dari : <https://www.aljazeera.com/news/2021/11/11/sudan-army-chief-issues-a-decree-for-new-sovereign-council>
- Aljazeera. 2023. As Sudan war rages rival sides accused of looting diverting aid. Diambil dari : <https://www.aljazeera.com/news/2023/6/16/as-sudan-war-rages-rival-sides-accused-of-looting-diverting-aid>
- Aljazeera. 2023. Fears in Sudan as army and paramilitary force face off. Diakses dari: <https://www.aljazeera.com/news/2023/4/13/sudans-army-warns-of-rsfs-movements-in-khartoum-other-cities>
- BBC. 2023. „I haven"t slept, I"m terrified : Sudan capital rocked by fighting. Diambil dari : <https://www.bbc.com/news/live/world-africa-65285254>
- BBC. 2023. President Biden authorizes sanctions against Sudan. Diambil dari : <https://www.bbc.com/news/live/world-africa-65361155?page=2>
- Dafallah, A., Elmahi, O. K. O., Ibrahim, M. E., Elsheikh, R. E., & Blanchet, K. 2023. Destruction, disruption and disaster: Sudan's health system amidst armed conflict. *Conflict and health*, 17(1), 43. Diambil dari : <https://doi.org/10.1186/s13031-023-00542-9>
- Hathaway, J. C. 2005. The rights of refugees under international law. Cambridge University Press.
- CNN World. 2023. Fighting between Sudan military rivals enters a second day, with dozens dead. Diakses dari : <https://edition.cnn.com/2023/04/15/africa/sudan-presidential-palace-intl/>

- IGAD Secretariat. (2023). Joint Statement of Commitments from Jeddah Talks Between Sudanese Armed Forces and Rapid Support Forces. Diambil dari : <https://igad.int/statement-of-commitments-from-jeddah-talks%20between-sudanese-armed-forces-and-rapid-support-forces/>
- IRC. 2025. IRC responds to rapidly spreading cholera outbreak in eastern Chad. Diambil dari : <https://www.rescue.org/press-release/irc-responds-rapidly-spreading-cholera-outbreak-eastern-chad>
- Jumah. O. 2023. Policy & Legal in Chad. Diambil dari: <https://developmentactionrefugees.org/country-responses/chad/policy-legal-chad>
- Loescher, G. 2001. The UNHCR and world politics: A perilous path. Oxford University Press.
- OCHA. 2023. Sudan Eight Months of Conflict Key Facts and Figures. Diambil dari : <https://www.unocha.org/publications/report/sudan/sudan-seven%20months-conflict-key-facts-and-figures-15-december-2023>
- Radio Dabanga. 2023. Sudanese refugees in Chad face health and hunger crisis. Diambil dari : <https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudanese-refugees-in-chad-face-health-and-hunger-crisis>
- Romsan, A dkk. 2003. Pengantar Hukum Pengungsi Internasional , Bandung : Sanic Offset.
- Siddiq, E. A. 2023. THE IMPACT OF SUDAN’S ARMED CONFLICT ON THE FISCAL SITUATION AND SERVICE DELIVERY. UNICEF Sudan. Diambil dari : <https://www.unicef.org/sudan/reports/impact-sudans-armed-conflict-fiscal-situation-and-service-delivery>
- The New York Times. 2023. Sudanese City becomes Center of „New Phase“ of War. Diambil dari : <https://www.nytimes.com/2023/07/11/world/africa/sudan-war.html>
- UNHCR. 2023. Protection Brief Chad July 2023. Diambil dari : <https://data.unhcr.org/en/documents/details/102008>
- UNHCR. 2023. UNHCR CHAD | Influx of Refugees from Sudan (as of december 2023). Diambil dari : <https://data.unhcr.org/en/documents/details/105520>
- UNHCR. 2024. Chad: Refugee Policy Review Framework. Diambil dari : <https://data.unhcr.org/en/documents/details/107254>
- UNHCR. 2025. Sudan Emergency Regional Refugee Response. Diambil dari : <https://data.unhcr.org/en/documents/details/114537>
- UNHCR. 2026. Funding shortfalls put lifelines at risk for Sudanese refugees in Chad. Diambil dari : <https://www.unhcr.org/africa/news/press-releases/funding-shortfalls-put-lifelines-risk-sudanese-refugees-chad>

UN Geneva. 2023. UN Geneva Press Briefing. Diambil dari :
<https://www.ungeneva.org/en/news-media/bi-weekly%20briefing/2023/12/press-briefing-united-nations-information-service-1>

UN General Assembly. 1967. Protocol relating to the Status of Refugees. Diambil dari :
<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-relating-status-refugees>

War Child UK. 2026. Sudan, Three Years On : NGOS Call for Intensified Actions as the World's Largest Displacement Crisis Grows. Diambil dari :
<https://www.warchild.org.uk/news/sudan-three-years-ngos-call-intensified-action-worlds-largest-displacement-crisis-grows>

WHO. 2025. Sudan conflict and refugee crisis. Diambil dari :
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/2021-dha-docs/20250527_sudan-emergency-sitrep-10.pdf